

PERWUJUDAN NILAI – NILAI TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN
KONSEP VALUE FOR MONEY DALAM PENGELOLAAN AKUNTANSI
KEUANGAN SEKTOR PUBLIK PADA BAPPEDA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana**



**CLARRISA RAMADANTY
NIM.B1033161013**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2022**

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Clarrisa Ramadanty
NIM : B1033161013
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul proposal Skripsi : Perwujudan Nilai – nilai Transparansi, Akuntabilitas dan konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik pada BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proposal Skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan proposal Skripsi dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.



B1033161013

PERTANGGUNGJAWABAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Clarrisa Ramadanty
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Ujian : 31 Januari 2022
Judul Skripsi : Perwujudan Nilai – nilai Transparansi, Akuntabilitas dan konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik pada BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 31 Januari 2022

Clarrisa Ramadanty

NIM. B1033161013

LEMBAR YURIDIS

Perwujudan Nilai – Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik Pada BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat

Penanggung Jawab Yuridis

Clarrisa Ramadanty

NIM. B1033161013

Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tgl Ujian Skripsi dan Komprehensif : 31 Januari 2022

Majelis Pengaji

No	Majelis Pengaji	Nama/NIP	Tgl/Bln Thn	Tanda Tangan
1	Ketua Pengaji	Dr. Ahmad Hitten, SE, MM, Ak	05/02/2022	
		NIP. 195704161988101001		
2	Pengaji 1	Khristina Yunita, SE, M.Si, Ak, CA	26/06/2023	
		NIP. 197906182002122003		
3	Pengaji 2	Sari Rusmita, SE, MM, CIQaR	26/06/2023	
		NIP. 19810916200604001		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin-Nya saya mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Perwujudan Nilai-nilai Transparansi, Akuntabilitas dan konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik pada BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat” dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana (S1) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tanjungpura, Pontianak. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada :

- Dr. Akhmad Hitten, SE, MM, Ak selaku Dosen Pembimbing saya.
- Khristina Yunita, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi serta Dosen Penguji 1 saya.
- Sari Rusmita, SE, MM, CIQaR, selaku Dosen Penguji 2 saya.
- Segenap Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu melayani segala administrasi yang diperlukan untuk penulisan ini.
- Untuk orang tua saya Bapak Markal dan Ibu Habibah serta abang dan adik saya Kharisma Rizki Utama dan M Rizieq Alfarizy yang saya sayangi, yang selalu mendukung segala apapun serta untuk menyelesaikan penulisan skripsi saya.
- Untuk suami tercinta saya Awang Rizwan yang sudah sangat sabar mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan dukungan masukan untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi saya.
- Untuk kakak ipar saya Nindy Puspitasari S.E., M.Ak saya yang sudah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi saya dan mengajari saya.
- Teruntuk teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan teman seangkatan saya yang selalu mendukung selama perkuliahan sampai selesai penulisan skripsi.

Saya ucapkan terima kasih untuk semua pihak pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang turut membantu menyelesaikan skripsi saya yang belum sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Dan saya berharap saran dan kritik dari pembaca dapat saya terima. Sekian dan Terima kasih

Pontianak, 28 Januari 2022

Clarrisa Ramadanty

**PERWUJUDAN NILAI – NILAI TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS,
DAN KONSEP VALUE FOR MONEY DALAM PENGELOLAAN
AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK PADA BAPPEDA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Oleh:

Clarrisa Ramadanty

ABSTRAK

Pemerintahan yang baik (*good governance*), adanya pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat. Dengan ini untuk mengetahui penerapan nilai – nilai transparansi, akuntabilitas dan value for money dalam pengelolaan keuangan akuntan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat, dan juga mengetahui konsep value for money terhadap kinerja dari program kerja yang telah dilaksanakan. Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Penelitian ini dengan metode kualitatif, yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi pustaka. Wawancara dilakukan langsung dengan informan, dalam penelitian ini ada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa perwujudan nilai transparansi sudah diterapkan dengan adanya keterbukaan informasi dan proses nilai akuntabilitas pertanggungjawaban terhadap publik dan pemerintah sesuai dengan aturan dalam proses pengelolaan keuangan akuntansi dengan menggunakan sistem yang berbasis akrual, dan konsep value for money sudah ekonomis, efisiensi, dan efektifitas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Barat sesuai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan ini kinerja Bappeda sudah baik untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas serta value for money di setiap program kerja yang ada.

Kata Kunci : Bappeda, transpransi, akuntabilitas, pengukuran kinerja, konsep value for money.

RINGKASAN SKRIPSI

PERWUJUDAN NILAI – NILAI TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN KONSEP VALUE FOR MONEY DALAM PENGELOLAAN AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK PADA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Latar Belakang

Akuntansi Sektor Publik adalah sistem akuntansi yang dipakai lembaga lembaga publik salah satu pertanggungjawaban pada publik. Lembaga publik saat ini dituntut untuk memperhatikan kualitas dan profesionalisme serta *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya dan dikelola secara akuntabel, transparansi serta bertanggung jawab. Keadilan bisa diwujudkan apabila ada aturan yang disampaikan secara transparan dan hasil pelaksanaan yang disampaikan kepada masyarakat secara jelas sehingga masyarakat dapat membandingkan kualitas pelayanan yang terimanya terhadap orang lain. Keterwujudan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan pemerintah pada akhirnya akan memberikan input pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat akan berpendapat bahwa kinerja pemerintah sudah berjalan dengan baik. Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi sehingga adanya tuntutan baru agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Salah satu upaya yang harus dilakukan adanya konsep *value for money* dalam menjalankan aktivitas pada pelayanan publik, Pemerintah daerah harus selalu memperhatikan setiap sen rupiah (uang) yang diperoleh dan dipergunakan. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah.

2. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemerintah daerah dalam mewujudkan nilai – nilai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik?
2. Bagaimana penerapan konsep *Value For Money* dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemerintah daerah dalam mewujudkan nilai – nilai transparansi dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik.
2. Untuk mengetahui konsep *Value For Money* dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Barat berlokasi di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78111

Sumber data diperoleh dari hasil wawancara, arsip dan dokumen yang dimiliki oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Barat.

5. Hasil dan Pembahasan

Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat yang dapat diartikan sebagai mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat. Untuk mengukur kinerja pemerintahan dalam pengelolaan dana publik sebaiknya menggunakan konsep *Value For Money*. Bappeda menggunakan konsep *Value For Money* untuk mendeskripsikan data dari hasil pengukuran program – program yang dibuat untuk mengetahui kinerja dari program kerja yaitu dari sisi ekonomi, sisi efisiensi, dan sisi efektivitas di Bappeda tahun 2020.

6. Kesimpulan dan Saran

Perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan Penerapan Konsep *value for money* dalam peningkatan kinerja Bappeda dilihat dari program – program kerja yang sudah terlaksanakan dengan baik serta adanya pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dari ekonomi, efisiensi, dan efektifitas sudah berjalan dengan baik karena dari segi ekonomi tidak adanya pemborosan atau sudah sesuai dengan target yang ditentukan.

Saran penulis untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) harus lebih menerapkan lagi Transparan dan Akuntabilitas dan konsep *value for money* pada anggaran dan program kerja apa saja yang telah terlaksana agar tidak adanya terjadi tindak korupsi dengan anggaran yang sudah di berikan dan di realisasikan tidak dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR ISI

Judul	i
Pernyataan Bebas Plagiat.....	ii
Pertanggungjawaban	iii
Lembar Yuridis	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstrak.....	vii
Ringkasan.....	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kontribusi Penelitian	6
1.4.1 Kontribusi Teoritis	6
1.4.2 Kontribusi Praktis.....	6
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1. Pemerintah Daerah	7
2.1.2. Prinsip Nilai Transparansi	8
2.1.3. Prinsip Nilai Akuntabilitas.....	11
2.1.4. Konsep <i>Value For Money</i>	14
2.1.5. Akuntansi Sektor Publik	16
2.1.6. Akuntansi Keuangan Sektor Publik.....	18
2.1.7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	20
2.2. Kajian Empiris	20
2.3. Kerangka Konseptual	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Bentuk Penelitian	26
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	26

3.3. Jenis dan Sumber Data.....	26
3.4 Lokasi Penelitian.....	26
3.5 Tahapan Penelitian.....	26
3.6 Alat Analisis	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Objek Penelitian.....	28
4.1.1. Nama dan Sejarah Singkat Instansi.....	28
4.1.2. Visi Organisasi.....	29
4.1.3. Misi Organisasi.....	29
4.1.4. Struktur Organisasi.....	30
4.2. Hasil Pembahasan Penelitian.....	32
4.2.1. Pemerintah Daerah Mewujudkan Nilai-Nilai Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik.....	32
4.2.2. Penerapan Konsep Value For Money Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah.....	36
4.2.3. Pembahasan Pemerintah Daerah mewujudkan Nilai-Nilai Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik.....	39
4.2.4. Penerapan Konsep Value For Money Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah.....	46
BAB IV PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	53
5.2. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan antara Sektor Publik dan Sektor Swasta	16
Tabel 2.2	Perbedaan antara Akuntansi Sektor Publik Dan Akuntansi Sektor Swasta.....	16
Tabel 2.3	Kerangka Konseptual	23
Tabel 4.1	Struktur Organisasi	30
Tabel 4.2	Kriteria Ekonomi Kinerja Keuangan	37
Tabel 4.3	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan.....	37
Tabel 4.4	Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan.....	38
Tabel 4.5	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2019	45
Tabel 4.6	Neraca Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	45
Tabel 4.7	Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	46
Tabel 4.8	Laporan Operasional Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	46
Tabel 4.9	Beban Operasi.....	46
Tabel 4.10	Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2020.....	47
Tabel 4.11	Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun 2020.....	47
Tabel 4.11	Ekonomi, Efisiensi, Efektifitas Terhadap Program Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Barat.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntansi Sektor Publik adalah sistem akuntansi yang dipakai lembaga lembaga publik salah satu pertanggungjawaban pada publik. Lembaga publik saat ini dituntut untuk memperhatikan kualitas dan profesionalisme serta *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya dan dikelola secara akuntabel, transaparansi serta bertanggung jawab. Akuntabilitas dan transparansi salah satu elemen penting dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), adanya pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat banyak menurut Pertiwi (2015:2).

Suryo (2008:113) berpendapat bahwa *good governance* yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek akuntansi adalah transparansi dan akuntabilitas. Pada aspek transparansi secara logis informasi – informasi yang menjadi hak publik disampaikan secara transparan dan aspek akuntabilitas terhadap masyarakat tetap dilaksanakan secara baik dan benar, agar kedua aspek tersebut di percaya dan dapat diterima di tengah masyarakat. Dan masyarakat akan menilai baik terhadap kinerja pemerintahan, dengan adanya transaparansi dan akuntabilitas yang diterapkan, dan keadilan pelayanan publik dapat dicapai.

Keadilan bisa diwujudkan apabila ada aturan yang disampaikan secara transparan dan hasil pelaksanaan yang disampaikan kepada masyarakat secara jelas sehingga masyarakat dapat membandingkan kualitas pelayanan yang terimanya terhadap orang lain. Keterwujudan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan pemerintah pada akhirnya akan memberikan input pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat akan berpendapat bahwa kinerja pemerintah sudah berjalan dengan baik.

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi sehingga adanya tuntutan baru agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu; ekonomi, efisiensi, dan efektivitas Mardiasmo (2002:4). Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan segala urusan pemerintahan dapat optimal.

Harun (2009:13) menegaskan bahwa, pemerintah di negara mana pun di seluruh dunia mengumpulkan, mengatur dan membelanjakan dana masyarakat ribuan miliar dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jika pemerintahan tidak secara efisien dan efektif dapat di pungkiri sebagai suatu kebocoran besar – besaran dalam suatu ekonomi. Pemerintah diberi kepercayaan oleh rakyat untuk mengola aset dan kewajiban untuk kesejahteraan warga negara di masa yang akan datang. Dengan demikian masyarakat berhak terhadap akses informasi yang menjadi dasar tanggung jawab pemerintah atas penggunaan sumber – sumber ekonomi publik, pembiayaan operasional, kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya sekarang, serta kemampuan menghadapi krisis yang mungkin terjadi.

Salah satu upaya yang harus dilakukan adanya konsep *value for money* dalam menjalankan aktivitas pada pelayanan publik, Pemerintah daerah harus selalu memperhatikan setiap sen rupiah (uang) yang diperoleh dan dipergunakan. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti penggunaan anggaran tersebut yang harus mencapai target – target yang bertujuan untuk kepentingan publik menurut Anggadini (2012:7).

Pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi untuk kesejahteraan masyarakat konsep *value for money*

sangat mutlak untuk dilakukan karena memperbaiki kinerja sektor publik secara ekonomi, efisien, efektif dalam mencapai suatu tujuan organisasi menurut Mardiasmo (2005:7). Prinsip transparansi memiliki kedudukan yang penting dalam implementasi konsep *good governance*. Melalui informasi yang transparan dan mudah di akses, akan memudahkan publik untuk memahami dan berpartisipasi secara nyata dalam proses – proses yang berkepentingan dengan publik.

CUI – ITB (2004:35) menyatakan transparansi informasi akan membuka ruang transaksi sosial antara *stakeholder* dengan pemerintahan serta akuntabilitas juga sangat di perlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan katalain bahwa kedua prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak dapat berjalan sendiri – sendiri karena terdapat hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Sedangkan pendapat Abdullah (2010:5) bahwa akuntabilitas akan dapat meningkatkan *good governance*, karena adanya pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat kepada pemberi mandat. Melalui akuntabilitas tercipta pengawasan kekuasaan dari lembaga pemerintahan. Wiranto (2012:1) mengatakan bahwa Good Governance dapat dipahami sebagai implementasi otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam proses manajemen berbagai urusan publik pada berbagai level dalam suatu negara. Good Governance memiliki beberapa indikator seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan seajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum. Agar dapat berjalan dengan baik Good Governance didukung juga dengan tiga pilar utama, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ketiga pilar ini mempunyai interaksi sangat kuat antara satu dengan yang lainnya. Sektor pemerintah mempunyai peranan sebagai regulator yang mengatur agar sumber daya yang ada dapat teralokasi secara optimal. Sektor swasta berperan mengeksplorasi dan memberikan nilai tambah terhadap sumber daya sehingga dapat dikonsumsi atau dinikmati oleh masyarakat. Disisi lain, masyarakat selaku konsumen utama dari publik mengharapkan agar sumber daya yang ada dapat diperoleh dengan mudah dan dengan harga yang terjangkau.

Auditya (2013:24) berpendapat bahwa pengukuran kinerja instansi pemerintah memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Pemahaman

mengenai konsep kinerja organisasi publik dari perspektif kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi publik. Khusus organisasi publik berkaitan erat dengan produktifitas, kualitas, layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, serta persamaan pelayanan. Penerapan berbagai aturan perundang – undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Dasar penulis untuk melakukan penelitian BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat adalah untuk melihat dan menganalisa keterbukaan informasi (Transparansi) dan pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pengelolaan anggaran telah dilakukan secara ekonomis, efisiensi, dan efektif (*Value for money*).

Berdasarkan keadaan tersebut permasalahan ini menjadi menarik, maka penulis bermaksud untuk meneliti dan memahami dalam permasalahan ini dan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul **“Perwujudan Nilai-nilai, Transparansi, Akuntabilitas, dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik Pada BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tersebut, maka masalah yang akan dikemukakan penulis sebagai dasar penelitian yaitu:

1. Bagaimana pemerintah daerah dalam mewujudkan nilai – nilai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik?
2. Bagaimana penerapan konsep *Value For Money* dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah?

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini untuk menjawab masalah yang terdapat pada rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemerintah daerah dalam mewujudkan nilai – nilai transparansi dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik.
2. Untuk mengetahui konsep *Value For Money* dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

b. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian ini terdapat kontribusi penelitian teoritis dan kontribusi penelitian praktis.

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti, dan memberikan manfaat akademis dalam bentuk sumbang saran dalam perkembangan ilmu pemerintahan pada umumnya.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi bahan masukan untuk pemerintah daerah khususnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar dengan adanya nilai nilai transparansi atau keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adanya pengukuran kinerja dengan konsep *Value For Money* serta memberikan manfaat bagi para pemakai laporan keuangan dan manajemen pemerintahan, agar terciptanya tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*).